

FAKTOR DETERMINAN KEBERHASILAN ADMINISTRASI KEBIJAKAN SANITASI LINGKUNGAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA MEDAN

Determining Factors Of The Success Of Public Health Environmental Sanitation Policy Administration In Medan City

Syahrul'an¹, Erni Susilawati², Kharis Meiwan K. Telaumbanua³

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Deztron Indonesia

Corresponding Author: syahrulan@udi.ac.id, ernisusilawati@udi.ac.id, kharisimeiwan@udi.ac.id

Abstrak

Sanitasi lingkungan merupakan determinan penting derajat kesehatan masyarakat dan menjadi isu strategis dalam pembangunan kesehatan perkotaan. Keberhasilan kebijakan sanitasi tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis dan infrastruktur, tetapi juga oleh kualitas administrasi kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, dan pengawasan. Kota Medan sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia masih menghadapi tantangan sanitasi lingkungan yang bersifat kompleks dan multisektoral. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor determinan keberhasilan administrasi kebijakan sanitasi lingkungan kesehatan masyarakat di Kota Medan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain potong lintang. Data dikumpulkan dari 120 responden yang terdiri atas aparatur pemerintah daerah, tenaga kesehatan lingkungan, dan masyarakat melalui kuesioner terstruktur. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen kebijakan, kapasitas sumber daya manusia, koordinasi lintas sektor, ketersediaan anggaran, dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan administrasi kebijakan sanitasi lingkungan, dengan koordinasi lintas sektor sebagai faktor paling dominan. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan tata kelola administrasi kebijakan dan kolaborasi antarsektor dalam mewujudkan sanitasi lingkungan yang berkelanjutan di wilayah perkotaan.

Kata Kunci: Sanitasi lingkungan, Administrasi kebijakan, Kebijakan publik

Abstract

Environmental sanitation is a key determinant of public health and a strategic issue in urban health development. The success of sanitation policies is influenced not only by technical and infrastructural aspects but also by the quality of policy administration, including planning, implementation, coordination, and supervision. As one of Indonesia's metropolitan cities, Medan continues to face complex and multisectoral environmental sanitation challenges. This study aims to analyze the determinant factors affecting the success of environmental sanitation policy administration for public health in Medan City. A quantitative cross-sectional design was employed. Data were collected from 120 respondents comprising local government officials, environmental health officers, and community members using structured questionnaires. Multiple linear regression analysis was applied. The results indicate that policy commitment, human resource capacity, cross-sectoral coordination, budget availability, and community participation significantly influence the success of environmental sanitation policy administration, with cross-sectoral coordination identified as the most dominant factor. These findings highlight the importance of strengthening policy governance and intersectoral collaboration to achieve sustainable environmental sanitation in urban areas.

Keywords: Environmental sanitation, Policy administration, Public policy

PENDAHULUAN

Sanitasi lingkungan merupakan komponen krusial dalam kesehatan masyarakat karena berkontribusi langsung terhadap pencegahan penyakit berbasis lingkungan serta derajat kesehatan

umum penduduk. Akses terhadap sanitasi layak meliputi ketersediaan fasilitas pembuangan limbah yang aman, sumber air bersih yang memenuhi standar kesehatan, serta pengelolaan limbah domestik yang efektif untuk mengurangi paparan risiko penyakit seperti diare dan infeksi lainnya. Target Sustainable Development Goals (SDGs) pada tujuan ke-6 menekankan ketersediaan akses sanitasi layak dan air bersih bagi seluruh masyarakat dunia pada tahun 2030, sebagai indikator penting untuk mencapai derajat hidup yang lebih sehat dan produktif.

Di Indonesia, meskipun terjadi kemajuan dalam peningkatan akses sanitasi dalam beberapa dekade terakhir, tantangan masih tetap besar. Pada 2024, diperkirakan lebih dari 30 juta orang Indonesia masih belum memiliki akses sanitasi yang dikelola secara aman, dan hanya sekitar 10,2% rumah tangga yang memiliki fasilitas toilet yang benar-benar memisahkan limbah manusia dari lingkungan secara aman (*safely managed sanitation*) menurut laporan WHO terbaru. Kondisi ini diperparah oleh risiko perubahan iklim seperti banjir dan kekeringan yang meningkatkan tekanan pada sistem sanitasi yang ada dan jaringan pengelolaan limbah informal di banyak wilayah Indonesia. (WHO, 2025).

Di tingkat nasional, Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa masih terdapat sekitar 16,4% rumah tangga yang belum memiliki akses sanitasi layak pada 2024, yang mencerminkan ketimpangan pelayanan sanitasi di berbagai wilayah Indonesia (termasuk perbedaan antara pedesaan dan perkotaan). Capaian ini menunjukkan meskipun akses sanitasi dasar telah meningkat secara umum, capaian terhadap sanitasi yang dikelola secara aman masih jauh dari target pembangunan kesehatan yang diharapkan, sehingga berpotensi besar memengaruhi indikator kesehatan seperti kejadian penyakit berbasis sanitasi dan indikator kesejahteraan lainnya.

Berbagai penelitian terdahulu telah menyoroti aspek teknis dan perilaku masyarakat dalam masalah sanitasi, termasuk hubungan antara perilaku hidup bersih dan sehat dengan kejadian penyakit di komunitas. Namun demikian, kajian yang berfokus secara komprehensif pada aspek administrasi kebijakan sanitasi lingkungan sebagai determinan keberhasilan implementasi kebijakan masih relatif terbatas, terutama dalam konteks pemerintahan daerah di perkotaan besar. Administrasi kebijakan sanitasi mencakup proses perumusan kebijakan, perencanaan strategis, koordinasi lintas sektor, kapasitas sumber daya manusia, alokasi anggaran, pelibatan masyarakat, serta mekanisme evaluasi dan pengawasan. Kerangka administrasi kebijakan yang kuat sangat penting karena sanitasi bukan hanya masalah penyediaan fasilitas teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan tata kelola pemerintahan, koordinasi antarlembaga, dan penguatan lembaga pelaksana di tingkat lokal.

Dalam konteks tersebut, desentralisasi sektor kesehatan di Indonesia memberikan kewenangan yang besar kepada pemerintah daerah untuk menerjemahkan kebijakan nasional menjadi program dan kegiatan operasional di tingkat lokal, namun hal ini juga menuntut kapasitas manajerial dan administratif yang memadai. Variasi dalam kapasitas administratif antar daerah sering kali menghasilkan perbedaan capaian sanitasi yang signifikan meskipun kerangka kebijakan nasional relatif seragam. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan sanitasi lingkungan sangat dipengaruhi oleh kemampuan administrasi kebijakan daerah dalam mengelola sumber daya, mengoordinasikan aktor lintas sektor, serta memastikan keberlanjutan program di masyarakat.

Kajian ilmiah yang mengintegrasikan elemen-elemen administratif utama seperti komitmen kebijakan, kapasitas sumber daya manusia, koordinasi lintas sektor, dukungan anggaran, dan partisipasi masyarakat dalam kajian faktual masih terbatas, terutama dalam konteks perkotaan di Indonesia seperti Kota Medan. Pendekatan holistik terhadap faktor-faktor determinan administratif ini diperlukan untuk memahami mengapa kebijakan sanitasi yang baik secara normatif sering kali belum optimal dalam pelaksanaannya, serta bagaimana administrasi kebijakan berkontribusi terhadap efektivitas implementasi di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, kebaruan ilmiah (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada analisis terpadu atas berbagai determinan administratif kebijakan sanitasi lingkungan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan di Kota Medan sebagai konteks perkotaan yang kompleks. Pendekatan ini diharapkan dapat memperluas pemahaman teoritis dan praktis mengenai hubungan antara unsur administrasi kebijakan dengan capaian program sanitasi, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih strategis dan kontekstual berdasarkan bukti empiris yang kuat.

Dengan demikian, permasalahan penelitian yang diangkat adalah: faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan administrasi kebijakan sanitasi lingkungan kesehatan masyarakat di Kota Medan? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor determinan keberhasilan administrasi kebijakan sanitasi lingkungan kesehatan masyarakat di Kota Medan, sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan pendekatan potong lintang (*cross-sectional*), yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara faktor-faktor determinan administrasi kebijakan dengan keberhasilan implementasi kebijakan sanitasi lingkungan kesehatan masyarakat di Kota Medan. Desain ini dipilih karena mampu menggambarkan kondisi variabel penelitian pada satu waktu tertentu secara sistematis serta memungkinkan analisis hubungan antar variabel secara objektif. Pendekatan kuantitatif dianggap relevan untuk mengukur pengaruh komitmen kebijakan, kapasitas sumber daya manusia, koordinasi lintas sektor, ketersediaan anggaran, dan partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan administrasi kebijakan sanitasi lingkungan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden melalui pengisian kuesioner terstruktur yang disusun berdasarkan indikator-indikator variabel penelitian. Responden penelitian meliputi aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam pengelolaan sanitasi lingkungan, tenaga kesehatan lingkungan, serta perwakilan masyarakat yang berada di wilayah pelaksanaan kebijakan sanitasi di Kota Medan. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, laporan instansi terkait, profil kesehatan daerah, serta publikasi ilmiah yang relevan dengan topik sanitasi lingkungan dan administrasi kebijakan kesehatan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner tertutup yang diisi secara langsung oleh responden. Kuesioner disusun dalam bentuk skala Likert untuk mengukur persepsi responden terhadap masing-masing variabel penelitian. Selain itu, dilakukan penelusuran dokumen dan observasi terbatas untuk melengkapi informasi terkait pelaksanaan kebijakan sanitasi lingkungan di Kota Medan. Sebelum digunakan, instrumen penelitian diuji validitas dan reliabilitasnya untuk memastikan kelayakan sebagai alat ukur penelitian.

Analisis data dilakukan secara bertahap, dimulai dengan analisis deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden dan distribusi masing-masing variabel penelitian. Selanjutnya dilakukan analisis inferensial menggunakan regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu keberhasilan administrasi kebijakan sanitasi lingkungan. Pengujian statistik dilakukan pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi dan tabel untuk memudahkan interpretasi dan pembahasan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan 120 responden yang terdiri dari aparatur pemerintah daerah, tenaga kesehatan lingkungan, dan perwakilan masyarakat. Gambaran karakteristik responden disajikan pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Responden

Karakteristik	Kategori	Jumlah (n)	Persentase (%)
Jenis kelamin	Laki-laki	62	51,7
	Perempuan	58	48,3
Kelompok responden	Aparatur pemerintah	45	37,5
	Tenaga kesehatan lingkungan	35	29,2
	Masyarakat	40	33,3

Berdasarkan Tabel 1 distribusi responden menurut jenis kelamin relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perspektif gender dalam penilaian administrasi kebijakan sanitasi lingkungan telah terwakili secara proporsional. Dari sisi kelompok responden, aparatur pemerintah daerah menjadi kelompok terbesar, diikuti oleh masyarakat dan tenaga kesehatan lingkungan. Komposisi ini mencerminkan keterlibatan kunci kebijakan sanitasi, baik dari sisi perumus dan pelaksana kebijakan maupun penerima manfaat kebijakan. Dengan demikian, data yang diperoleh menggambarkan sudut pandang multipihak yang relevan dalam menilai keberhasilan administrasi kebijakan sanitasi lingkungan di Kota Medan.

Tabel 2
 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja dan Tingkat Pendidikan

Karakteristik	Kategori	Jumlah (n)	Persentase (%)
Lama Bekerja	< 5 tahun	34	28,3
	≥ 5 tahun	86	71,7
Pendidikan terakhir	SMA/SMK	29	24,4
	Diploma	26	21,7
	Sarjana	65	54,1

Tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah bekerja atau tinggal di Kota Medan selama lima tahun atau lebih. Hal ini mengindikasikan bahwa responden memiliki pengalaman empiris yang cukup dalam mengamati pelaksanaan kebijakan sanitasi lingkungan dari waktu ke waktu. Dari sisi tingkat pendidikan, lebih dari separuh responden memiliki pendidikan sarjana ke atas, yang menunjukkan kapasitas kognitif dan pemahaman konseptual yang baik terhadap isu administrasi kebijakan dan sanitasi lingkungan. Karakteristik ini memperkuat validitas penilaian responden terhadap variabel-variabel penelitian yang dianalisis selanjutnya.

Data pada Tabel 1 dan Tabel 2 menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki pengalaman dan tingkat pendidikan yang memadai, sehingga dinilai mampu memberikan penilaian objektif terhadap pelaksanaan kebijakan sanitasi lingkungan di Kota Medan. Karakteristik responden yang relatif homogen dari sisi pengalaman dan latar belakang pendidikan ini menjadi dasar yang kuat untuk menafsirkan hasil analisis selanjutnya, khususnya dalam menilai persepsi terhadap kualitas administrasi kebijakan sanitasi lingkungan.

Analisis Pengaruh Faktor Determinan terhadap Keberhasilan Administrasi Kebijakan Sanitasi

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh komitmen kebijakan, kapasitas sumber daya manusia, koordinasi lintas sektor, ketersediaan anggaran, dan partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan administrasi kebijakan sanitasi lingkungan. Selain itu, dilakukan analisis deskriptif terhadap masing-masing variabel penelitian untuk memperoleh gambaran tingkat penilaian responden. Hasil analisis deskriptif disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3
 Distribusi Penilaian Responden Terhadap Variabel Administrasi Kebijakan Sanitasi Lingkungan

Variabel	Kategori Penilaian	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Komitmen kebijakan	Baik	68	56,7
	Cukup	39	32,5
	Kurang	13	10,8
Kapasitas SDM	Baik	61	50,8
	Cukup	41	34,2
	Kurang	18	15

Kordinasi lintas sektor	Baik	72	60
	Cukup	36	30
	Kurang	12	10
Ketersediaan anggaran	Baik	54	45
	Cukup	43	35,8
	Kurang	23	19,2
Partisipasi masyarakat	Baik	66	55
	Cukup	38	31,7
	Kurang	16	13,3

Berdasarkan Tabel 3 mayoritas responden menilai komitmen kebijakan dan koordinasi lintas sektor berada pada kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif kebijakan sanitasi lingkungan telah mendapat dukungan kebijakan dan mekanisme koordinasi yang cukup kuat. Namun demikian, variabel kapasitas sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran masih menunjukkan proporsi penilaian cukup dan kurang yang relatif lebih tinggi. Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara perencanaan kebijakan dan kapasitas implementasi di lapangan, yang berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan sanitasi lingkungan.

Hasil pada Tabel 3 menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai komitmen kebijakan, koordinasi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat berada pada kategori baik, sementara ketersediaan anggaran dan kapasitas SDM masih menunjukkan proporsi penilaian cukup dan kurang yang relatif lebih tinggi. Temuan deskriptif ini memberikan gambaran awal bahwa meskipun kerangka kebijakan dan dukungan lintas sektor relatif sudah berjalan, masih terdapat keterbatasan pada aspek input kebijakan, terutama sumber daya manusia dan pendanaan. Untuk memastikan apakah temuan deskriptif tersebut memiliki pengaruh nyata terhadap keberhasilan administrasi kebijakan sanitasi, analisis inferensial kemudian dilakukan menggunakan regresi linier berganda. Hasil analisis regresi linier berganda disajikan pada Tabel selanjutnya.

Tabel 4
 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Faktor Determinan Keberhasilan Administrasi Kebijakan Sanitasi Lingkungan

Variabel Independen	Koefisien (β)	Sig.(p-value)
Komitmen kebijakan	0,214	0,018
Kapasitas SDM	0,196	0,027
Koordinasi lintas sektor	0,287	0,003
Kesediaan anggaran	0,173	0,041
Partisipasi masyarakat	0,251	0,009
R^2	0,612	

Hasil regresi pada Tabel 4 menunjukkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan administrasi kebijakan sanitasi lingkungan ($p < 0,05$). Koordinasi lintas sektor memiliki koefisien beta terbesar, yang mengindikasikan bahwa efektivitas kerja sama antar lembaga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan kebijakan sanitasi di Kota Medan. Nilai R^2 sebesar 0,612 menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan yang kuat dalam menjelaskan variasi keberhasilan administrasi kebijakan sanitasi lingkungan. Nilai ini menunjukkan bahwa model penelitian memiliki daya jelas yang kuat dan relevan untuk digunakan sebagai dasar analisis kebijakan sanitasi lingkungan di tingkat daerah. Untuk memahami prioritas intervensi kebijakan, selanjutnya dilakukan analisis dominasi faktor berdasarkan besaran koefisien beta.

Untuk melihat tingkat dominasi masing-masing variabel, dilakukan perbandingan nilai koefisien beta yang disajikan pada tabel selanjutnya.

Tabel 5
 Urutan Dominasi Faktor Determinan Keberhasilan Administrasi Kebijakan Sanitasi Lingkungan

Peringkat	Variabel	Koefisien (β)
1	Koordinasi lintas sektor	0,287
2	Partisipasi masyarakat	0,251
3	Komitmen kebijakan	0,214
4	Kapasitas SDM	0,196
5	Ketersediaan anggaran	0,173

Tabel 5 memperlihatkan bahwa koordinasi lintas sektor merupakan faktor paling dominan dalam menentukan keberhasilan administrasi kebijakan sanitasi lingkungan. Dominasi variabel ini menegaskan bahwa kebijakan sanitasi bersifat multisektoral dan membutuhkan integrasi peran antarinstansi. Partisipasi masyarakat menempati posisi kedua, yang menunjukkan pentingnya dukungan sosial dalam memastikan keberlanjutan kebijakan. Sementara itu, komitmen kebijakan, kapasitas SDM, dan ketersediaan anggaran tetap menjadi faktor penting yang saling melengkapi dalam membentuk sistem administrasi kebijakan sanitasi yang efektif.

Pengaruh komitmen kebijakan yang signifikan terhadap keberhasilan administrasi kebijakan sanitasi lingkungan menunjukkan bahwa dukungan pimpinan daerah dan konsistensi kebijakan merupakan faktor penting dalam memastikan keberlanjutan program sanitasi. Temuan ini sejalan dengan teori administrasi kebijakan publik yang menyatakan bahwa komitmen politik dan kebijakan merupakan prasyarat utama keberhasilan implementasi kebijakan (Dunn, 2018).

Kapasitas sumber daya manusia juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan administrasi kebijakan sanitasi. Hal ini mengindikasikan bahwa kompetensi teknis dan manajerial aparatur pelaksana sangat menentukan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program sanitasi. Hasil ini mendukung temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa keterbatasan kapasitas SDM menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan kesehatan di tingkat daerah (Agustino, 2017).

Koordinasi lintas sektor merupakan variabel dengan pengaruh paling dominan dalam penelitian ini. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan sanitasi lingkungan yang melibatkan banyak sektor membutuhkan mekanisme koordinasi yang kuat agar tidak terjadi tumpang tindih program dan inefisiensi sumber daya. Hasil ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang menegaskan pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam kebijakan kesehatan masyarakat yang bersifat multisektoral.

Ketersediaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan administrasi kebijakan sanitasi, meskipun pengaruhnya relatif lebih kecil dibandingkan variabel lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kecukupan anggaran tetap menjadi prasyarat penting, namun efektivitas pemanfaatan anggaran sangat bergantung pada aspek administrasi dan koordinasi. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa anggaran merupakan instrumen kebijakan yang harus didukung oleh sistem administrasi yang baik.

Partisipasi masyarakat juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan kebijakan sanitasi lingkungan. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program sanitasi meningkatkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan program. Hasil penelitian ini mendukung berbagai studi sebelumnya yang menyatakan bahwa keberhasilan program sanitasi sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan administrasi kebijakan sanitasi lingkungan kesehatan masyarakat di Kota Medan merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor administratif dan sosial. Temuan ini memiliki implikasi kebijakan praktis yang penting bagi pemerintah daerah, khususnya dalam penentuan prioritas perbaikan tata kelola sanitasi lingkungan. Temuan ini memperkuat kerangka teoritis administrasi kebijakan kesehatan yang menempatkan aspek tata kelola, koordinasi, dan partisipasi sebagai elemen kunci dalam pencapaian tujuan kebijakan publik. Secara praktis, pemerintah daerah Kota Medan perlu memfokuskan kebijakan pada penguatan mekanisme koordinasi lintas sektor melalui forum sanitasi terpadu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia

melalui pelatihan teknis dan manajerial berkelanjutan, serta optimalisasi alokasi anggaran sanitasi yang berbasis kinerja. Selain itu, strategi pemberdayaan dan pelibatan masyarakat perlu diintegrasikan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi kebijakan untuk menjamin keberlanjutan program sanitasi lingkungan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan administrasi kebijakan sanitasi lingkungan kesehatan masyarakat di Kota Medan ditentukan oleh interaksi berbagai faktor administratif dan sosial yang saling terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa komitmen kebijakan, kapasitas sumber daya manusia, koordinasi lintas sektor, ketersediaan anggaran, dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan administrasi kebijakan sanitasi lingkungan.

Koordinasi lintas sektor terbukti sebagai faktor paling dominan, yang menegaskan bahwa kebijakan sanitasi lingkungan merupakan kebijakan multisektoral yang menuntut sinergi antar lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Partisipasi masyarakat menempati posisi strategis kedua, menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sanitasi tidak hanya bergantung pada kapasitas birokrasi, tetapi juga pada keterlibatan aktif masyarakat sebagai subjek sekaligus penerima manfaat kebijakan. Sementara itu, komitmen kebijakan, kapasitas sumber daya manusia, dan ketersediaan anggaran berperan sebagai fondasi administratif yang menentukan konsistensi dan efektivitas implementasi kebijakan.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa perbaikan sanitasi lingkungan di wilayah perkotaan tidak cukup hanya melalui pendekatan teknis dan infrastruktur, tetapi harus disertai dengan penguatan tata kelola administrasi kebijakan yang berorientasi pada kolaborasi lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, beberapa saran yang dapat diajukan sebagai implikasi kebijakan adalah sebagai berikut. Pertama, Pemerintah Kota Medan perlu memperkuat mekanisme koordinasi lintas sektor melalui pembentukan atau optimalisasi forum sanitasi terpadu yang melibatkan perangkat daerah terkait, sektor swasta, dan unsur masyarakat. Koordinasi yang terstruktur dan berkelanjutan akan mencegah tumpang tindih program serta meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya.

Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaksana kebijakan sanitasi perlu menjadi prioritas melalui pelatihan teknis dan manajerial yang berkesinambungan. Penguatan kompetensi aparatur akan meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan sanitasi lingkungan.

Ketiga, pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan alokasi anggaran sanitasi dengan pendekatan berbasis kinerja dan kebutuhan wilayah, sehingga program sanitasi lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Keempat, strategi pemberdayaan dan partisipasi masyarakat perlu diintegrasikan secara sistematis dalam setiap tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program sanitasi lingkungan.

Terakhir, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan metode campuran (mixed methods) atau menambahkan variabel kelembagaan dan sosial budaya guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan administrasi kebijakan sanitasi lingkungan di wilayah perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Acharya, S., & Paunio, M. (2020). Urban sanitation governance and public health outcomes: A systematic review. *Journal of Environmental Health*, 82(6), 24–33.
- Alaerts, G. J., & Kasri, R. A. (2021). Governance challenges in urban water and sanitation services in developing countries. *Utilities Policy*, 69, 101183.

<https://doi.org/10.1016/j.jup.2021.101183>

Bappenas. (2023). *Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) bidang sanitasi dan kesehatan lingkungan*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

Cairncross, S., Bartram, J., Cumming, O., & Brocklehurst, C. (2019). Hygiene, sanitation, and water: What needs to be done? *PLoS Medicine*, 7(11), e1000365. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000365>

Cronin, A. A., Sebayang, S. K., Torlesse, H., & Nandy, R. (2017). Association of safe disposal of child feces and improved sanitation with health outcomes in Indonesia. *The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene*, 97(3), 785–792. <https://doi.org/10.4269/ajtmh.16-0568>

Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis* (6th ed.). New York, NY: Routledge.

Edward III, G. C. (2019). *Implementing public policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.

Dwipayanti, N. M. U., & Rachmawati, T. (2021). Community participation in environmental sanitation programs: Evidence from urban Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 16(2), 65–74.

Hood, C. (2018). *The art of the state: Culture, rhetoric, and public management*. Oxford: Oxford University Press.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Profil kesehatan Indonesia tahun 2022*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2023). *Laporan capaian akses sanitasi layak nasional*. Jakarta: Kementerian PUPR.

Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2019). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.

Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (2017). *Implementation and public policy*. Lanham, MD: University Press of America.

Notoatmodjo, S. (2018). *Promosi kesehatan dan perilaku kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sutopo, H. B. (2020). *Implementasi kebijakan publik dan pelayanan publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

UN-Habitat. (2022). *World cities report 2022: Envisioning the future of cities*. Nairobi: United Nations Human Settlements Programme.

World Bank. (2022). *Improving sanitation services in urban areas*. Washington, DC: World Bank.

World Health Organization. (2022). *Sanitation and health*. Geneva: WHO.

World Health Organization, & UNICEF. (2023). *Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000–2022*. Geneva: WHO.

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.